

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN
KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Pemerintah
Kabupaten Bima, NTB)**

Ramdhani Nur Safitri*, Abdul Wahid Mahsuni, Junaidi*****

Email: ramdhaninursafitri23@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine whether there is an influence of the application of government accounting standards (SAP) and the quality of local government apparatuses on the quality of financial statements presented by government organizations. The population in this study are civil servants (PNS) who work in the Bima Regency Government. The research sample of 47 respondents. The sampling method uses Purposive Sampling Method. In conducting data analysis, using multiple linear regression analysis with the variable Implementation of Government Accounting Standards (SAP) and the Quality of Local Government Apparatus as an independent variable. Variable Quality of Financial Statements as the dependent variable. Based on the results of research conducted prove that the Application of Government Accounting Standards (SAP) and the Quality of Local Government Apparatus has a partial influence on the Quality of Financial Statements. The results also showed that it also had an influence on the Application of Government Accounting Standards (SAP) and the Quality of Local Government Apparatuses had a simultaneous influence on the quality of the Bima Regency Government Financial Statements.

Keywords: *Application of Government Accounting Standards, Quality of Local Government Apparatus, Quality of Financial Statements.*

PENDAHULUAN

Akuntansi adalah suatu bentuk pengelolaan dan pencatatan data keuangan yang mendasari timbulnya standar pelaporan keuangan pemerintah daerah untuk pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi merupakan pedoman, petunjuk, maupun aturan yang akan digunakan sebagai acuan oleh aparatur pemerintah (akuntan) sebagai prosedur yang diambil dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat dan berkualitas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan

adalah menyajikan informasi mengenai laporan posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna informasi dalam membuat dan mengevaluasi keputusan yang diambil mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan sebagai bentuk untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas maka laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang berkualitas tidak terlepas dari kualitas sumber daya aparatur pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Dengan demikian agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka sebagai aparatur pemerintah harus memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan dan mengetahui apa saja komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bima, NTB)”**. Rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan? Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan? Apakah kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui pengaruh secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Manfaat penelitian ini adalah manfaat bagi peneliti selanjutnya, akademis dan praktik.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kerangka Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh Suhardjo (2013) dengan judul penelitian **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)”** Hasil penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan

kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Basukianto (2015) dengan judul penelitian “ Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Kompetensi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.(2) Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.(3) Peran PPK-SKPD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (4) Rekonsiliasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (5) Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pasal 32 (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya pasal 32 (2) menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus merujuk pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, yang dimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

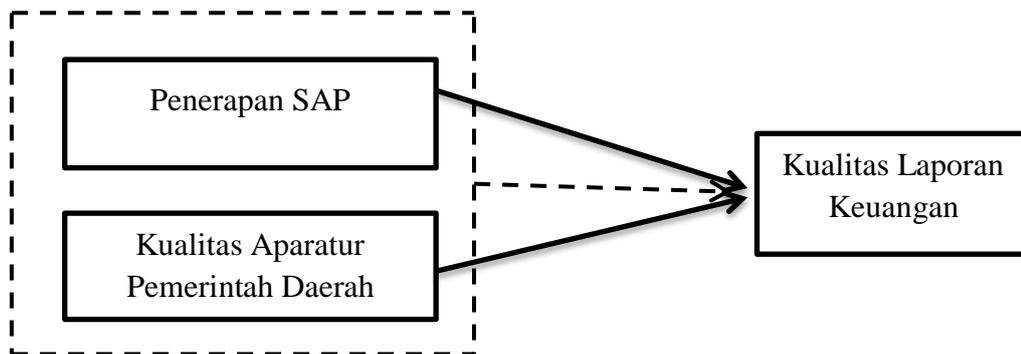
Dalam sebuah organisasi terutama organisasi pemerintahan terkait upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak bisa terlepas dari adanya unsur sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku atau penggerak jalannya sebuah organisasi. Sumber daya manusia (SDM) menjadi penentu berjalan tidaknya suatu organisasi, selain ketersediaan sarana dan prasarannya. Meskipun sarana dan prasarannya telah tersedia, akan tetapi sumber daya manusia (SDM) menjadi komponen utama dalam menjalankan organisasi. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan. Agar dapat memperoleh individu-individu yang berkualitas perlu adanya manajemen sumber daya manusia (MSDM), untuk memilih kriteria yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Kualitas Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang tersusun secara sistematis mengenai posisi keuangan dan berbagai transaksi-transaksi- yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik kualitatif yaitu:

1. Relevan,
2. Andal,
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami,

Pengembangan Hipotesis



Gambar 1: Kerangka Konseptual

- H₁ : Penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.
- H₂ : Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
- H₃ : Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah menggunakan *Purposive Sampling Method* yaitu: pengambilan sampel menggunakan kriteria bahwa anggota populasi yang menjadi sampel adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Bima yang menjadi bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), staf akuntansi/pembukuan/keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala

sub bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala bagian tata usaha/sekretariat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner / Angket. Menurut Bungin(2013: 133) Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner. Metode kuisioner yaitu rangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, lalu disebarakan untuk diisi oleh responden. Pertanyaan ditunjukkan kepada pegawai negeri sipil daerah (PNSD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bima.

Definisi Operasional Variabel

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2018:186) Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna informasi laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi adalah praktik khusus yang digunakan dalam mengimplementasikan standar.

Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Koswara, (2001) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya aparatur di era otonomi adalah kemampuan profesional dan keterampilan teknis para pegawai yang termasuk kepada unsur staf dan pelaksana di organisasi Pemerintah Daerah.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi yang dilakukan suatu entitas pelaporan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan adalah laporan yang tersusun secara sistematis mengenai posisi keuangan dan berbagai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

ANALISIS DATA

Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji instrument (uji validitas dan uji reliabilitas), uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas), uji regresi linier berganda, uji hipotesis (uji F, uji R^2 , dan uji t) yang di proses menggunakan aplikasi SPSS 14.0

PEMBAHASAN DAN SIMPULAN

Sampel yang menjadi data dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di bagian Kasubbag keuangan, Bendahara, Staf keuangan, dan kepala bagian tata usaha atau Sekretariat di 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bima.

Tabel 4.1 Daftar Jumlah PNS SKPD

No	Nama SKPD	Jumlah PNS	PNS yang Masuk Kriteria	Persentase %
1.	Inspektorat	76	6	8%
2.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).	65	10	15%
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	170	8	3%
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	43	8	19%
5.	Dinas Pariwisata	45	9	20%
6.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	333	9	3%
7.	Total	732	50	7%

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan PNS di 6 SKPD tersebut sebanyak 732 orang/PNS, dari jumlah tersebut hanya 50 orang/PNS yang dapat diberikan kuesioner penelitian dengan persentase hanya sebesar 7% saja. Karena tidak semua PNS yang ada di SKPD tersebut masuk dalam kriteria sebagai sampel penelitian.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan SAP	47	2,00	5,00	3,9574	,85865
Kualitas Aparatur	47	2,00	5,00	3,9362	,81838
Kualitas Laporan Keuangan	47	2,00	5,00	4,0638	,79137
Valid N (listwise)	47				

Sumber: Output SPSS

Variabel Penerapan SAP memiliki nilai minimum sebesar 2,00, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,9574 dan nilai standar deviasi 0,85865. Variabel Kualitas Aparatur memiliki nilai minimum sebesar 2,00, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata sebesar 3,9362 dan nilai standar deviasi sebesar 0,81838. Variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai minimum sebesar 2,00, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,0638 dan nilai standar deviasi sebesar 0,79137.

Hasil Uji Instrumen

a. Hasil Uji Validitas

Menunjukkan bahwa seluruh indicator atau pertanyaan kuesioner pada variabel penerapan SAP, kualitas aparatur dan kualitas laporan keuangan mempunyai nilai r hitung $>$ r tabel (0,288), maka dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Pertanyaan terdiri atas 47 pertanyaan yang terdapat pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintah sebanyak 30 pertanyaan, variabel kualitas aparatur pemerintah daerah sebesar 6 pertanyaan, dan variabel kualitas laporan keuangan sebanyak 11 pertanyaan.

b. Uji Reliabilitas

Menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,6. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penerapan SAP	Kualitas Aparatur Pemerintah	Kualitas Laporan Keuangan
N		47	47	47
Normal Parameters(a,b)	Mean	126.70	25.19	49.09
	Std. Deviation	12.599	3.041	5.191
Most Extreme Differences	Absolute	.106	.156	.202
	Positive	.069	.106	.127
	Negative	-.106	-.156	-.202
Kolmogorov-Smirnov Z		.726	1.070	1.386
Asymp. Sig. (2-tailed)		.668	.202	.043

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel penerapan SAP memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,726 dengan nilai signifikansi sebesar 0,668. Variabel kualitas aparatur pemerintah memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,070 dengan nilai signifikan sebesar 0,202. Variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,386 dengan nilai signifikan sebesar 0,043. Dari hasil analisis di atas diperoleh nilai signifikansi pengujian Kolmogorov-Smirnov Z pada setiap variabel $>$ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil penelitian dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

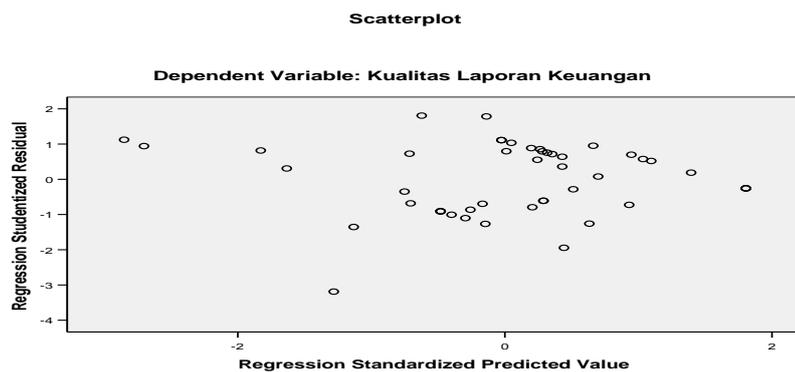
Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Penerapan SAP	0,406	2,466	Tidak terjadi multikolinearitas
Kualitas Aparatur Pemerintah	0,406	2,466	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: output SPSS

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa variabel penerapan SAP dan kualitas aparatur pemerintah memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

b. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode *scatterplot*, variabel penerapan SAP dan kualitas aparatur tidak terjadi heteroskedastisitas dengan melihat grafik *scatterplot* di atas menunjukkan bahwa terdapat titik-titik yang menyebar dibagian bawah maupun atas nol (0) dan titik-titik tersebut tidak membentuk pola teratur atau tertentu.

Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.775	5.454		2.342	.024
	Penerapan SAP (X1)	.141	.067	.341	2.098	.042
	Kualitas Aparatur (X2)	.734	.278	.430	2.642	.011

Sumber: Output SPSS, 2020

Tabel 4.5 menunjukkan nilai konstanta (α) sebesar 12,775, nilai variabel X1 sebesar 0,141 dan nilai variabel X2 sebesar 0,734 maka diperoleh persamaan regresi $Y = 12,775 + 0,141X1 + 0,734X2 + e$.

Hasil Uji Hipotesis

a. Uji F

Tabel 4.6 Hasil Uji F

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	654.052	2	327.026	24.571	.000(a)
	Residual	585.608	44	13.309		
	Total	1239.660	46			

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 24,571 > F tabel sebesar 3,20 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa variabel penerapan SAP (X1) dan kualitas aparatur pemerintah daerah (X) berpengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726(a)	.528	.506	3.64819

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,528, hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan SAP (X1) dan kualitas aparatur (X2) memiliki hubungan dalam menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 52,8%.

c. Uji t

Tabel 4.16 Hasil Uji t

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.775	5.454		2.342	.024
	Penerapan SAP (X1)	.141	.067	.341	2.098	.042
	Kualitas Aparatur (X2)	.734	.278	.430	2.642	.011

Sumber: Output SPSS, 2020

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi terhadap variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,098 > t tabel 2,015 dengan nilai signifikan sebesar 0,042 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam organisasi pemerintahan akan dapat meningkatkan dan menghasilkan informasi yang lebih baik, berguna dan berkualitas terhadap laporan keuangan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suharjo (2013), dan Angelica (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian Ariyanto (2015) dimana penerapan SAP menjadi variabel dependen (y) dan kualitas SDM sebagai variabel independen (x). Namun dalam penelitian Ariyanto menunjukkan kualitas SDM memiliki pengaruh terhadap penerapan SAP. Sehingga masih ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil analisis terhadap variabel kualitas aparatur pemerintah daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 2,642 > t tabel 2,015 dengan nilai signifikansi sebesar 0,011 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin berkualitasnya aparatur pemerintah daerah dalam hal pengetahuan, kemampuan dan memiliki kompetensi di bidang keuangan maka akan semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suharjo (2013) dan Basukianto (2015) yang menunjukkan bahwa Kualitas aparatur pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. berbeda dengan penelitian Ariyanto (2015) dimana yang menjadi variabel dependennya adalah penerapan SAP dan kualitas SDM sebagai variabel independen. Namun terdapat pengaruh positif antara variabel kualitas SDM terhadap variabel penerapan SAP. Sehingga masih berkaitan dengan penelitian ini.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi Hasil Penelitian

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya membahas dua variabel independen saja yaitu penerapan SAP dan kualitas aparatur pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga ada kemungkinan bahwa terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang tidak diambil untuk diteliti dalam penelitian ini.
2. Populasi dalam penelitian ini hanya mencakup satu lingkup daerah saja yaitu Kabupaten Bima, NTB.
3. Adanya keterbatasan pengambilan lokasi penelitian dimana hanya beberapa SKPD yang dapat diteliti dan dijadikan sampel penelitian .

Saran

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain dalam penelitian sehingga bisa memberikan gambaran bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas populasi dan lokasi penelitian sehingga data dan hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelicca, Maya. 2019. Pengaruh Penerapan Standar akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah). *E-Skripsi Akuntansi*.
- Darma Putra, I., & Ariyanto, D. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(1), 14-32.
- Febrian Cahyo Pradono, & Basukianto. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi

- Kebijakan (Studi pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 22(2), 1-3.
- Ghozali, Imam. 2015. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Masmudi. 2003. Laporan Keuangan Sektor Publik, Antara Konsep dan Praktek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Volume 3 nomor 1.
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 1 Vol. 13.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016. Tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. *Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010*.1-30.
- Rudianto, 2012. Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Adaptasi IFRS. Jakarta: Erlangga.
- Soloha, C. 2015. Kualitas Aparatur Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Morotai. *Jurnal Politico*, 2(6).
- Suhardjo, D.K.A. dan Yohanes. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal Stie Semareang*, 5(3), 93-111.
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governence dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat.
- *) Ramdhani Nur Safitri adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- **) Abdul Wahid Mahsuni adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- ***) Junaidi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.